

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAK

**Oleh : Syafi'i
NIM: 00976008194**

Penelitian ini dilakukan di Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu yang berlangsung sejak 01 februari sampai 29 Februari 2012 di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Berdasarkan Penelitian dilapangan dapat di simpulkan bahwa: Tata Cara Pemungutan pajak Restoran ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 dalam BAB XV yaitu: 1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyeter sendiri pajaknya ke Dinas Pendaptan Kabupaten Rokan Hulu, 2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur Pemungutan dan penerimaannya adalah 1. Pihak Dipenda melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak, 2. Penetapan Pajak, 3. Pembukuan dan Pelaporan, 4. Penyetoran/ Penagihan.

Wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 220 wajib pajak, terdiri dari pengusaha rumah makan 166 unit, warung bakso 43 unit, dan kedai kopi 11 unit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak restoran tersebut yaitu : kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyeter pajak itu sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah, dan banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang membuat dia enggan untuk membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw sekeluarga dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar serjana pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang tidak pernah bosan-basan memberikan dukungan dan do’a hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec atas segala bantuannya yang telah memudahkan

proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.

3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dan Mustiqowati Ummul Fitriah, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
4. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung Penyusunan Tugas Akhir ini
6. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Untuk teman-teman Angkatan Administrasi Perpajakan 2009 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
8. Untuk Definda Yanti Noviana yang selalu memberikan motivasi yang tidak henti-henti demi terselesainya Tugas Akhir ini
9. Semua pihak yang membantu penulisan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa di sebutkan.

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama menyusun Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, April 2012

Penulis,

SYAFI'I

NIM: 00976008194

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4. Metode Penelitian	7
5. Jenis Data.....	7
6. Teknik Pengumpulan Data.....	8
7. Analisis Data.....	8
8. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	10
1. Sejarah Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu	10
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.....	11

3. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan	
Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu	11
4. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu	18
5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan	
dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.....	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	21
A. TINJAUAN TEORI.....	21
1. Pengertian Pajak	21
2. Jenis- Jenis Pajak	22
3. Pajak Restoran	24
4. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran.....	26
5. Objek dan Subjek Pajak Restoran.....	27
6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	28
7. Tinjauan Pajak dalam Pandangan Islam	29
B. TINJAUAN PRAKTEK	30
1. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.....	30
2. Prosedur Standar Pemungutan Pajak Restoran	33
a. Pendataan dan Pendaftaran	34
b. Penetapan Pajak	35
c. Pembukuan dan Pelaporan.....	36
d. Pemungutan atau Penagihan	37
3. Tarif Pajak Restoran	37

4. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Restoran	38
5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Dispenda	
Kabupaten Rokan Hulu.....	4
TABEL I.2 Jumlah Objek Pajak yang Sudah Terdata	5
TABEL II.1 Jumlah Pegawai pada Dinas Pendapatan Rokan Hulu	18
TABEL III.1 Jumlah Objek Pajak yang Sudah Terdata.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Rokan Hulu), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Keseluruhan sektor pajak tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak restoran pada dasarnya adalah merupakan iuran atau pungutan yang wajib di bayar atas pelayanan yang di berikan restoran dengan pembayaran yang sifatnya dapat di paksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang di harapkan dengan menunjang

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan pembangunan yang di cita-citakan itu tercapai dengan baik.

Realisasi penerimaan pajak restoran adalah semua hasil pendapatan pajak restoran yang sudah ditargetkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut :

TABEL. I.1

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Dipenda Kabupaten Rokan Hulu.

NO	Tahun	Realisasi (Rp)	Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase
1	2009	842.891.078	-	-
2	2010	933.948.391	91.057.313	9,74%
3	2011	1.249.916.245	315.967.854	25,2%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak restoran yang terealisasi di Kabupaten Rokan Hulu tersebut sudah cukup baik, karena peningkatannya dari tahun ke tahun relatif besar, yakni pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 9,74 % pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 25,2 % lebih besar dari tahun sebelumnya.

Satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya peningkatan penerimaan pajak restoran untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rekanan (Rumah Makan) yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Restoran. Akan tetapi dilapangan, pemungutan pajak restoran terhadap wajib pajak yang terdaftar di Dispenda Rokan Hulu tersebut belum optimal karena kurangnya

pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Berikut jumlah objek pajak yang terdaftar di Kantor Dispenda KAbupaten Rokan Hulu:

TABEL I.2

Jumlah Objek Pajak yang sudah terdata

No	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Rumah Makan	166
2	Warung Bakso	43
3	Kedai Kopi	11
Jumlah		220

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dilihat objek pajak restoran yang sudah terdata sudah cukup bagus karena dari pernyataan yang diberikan terdata sebanyak 220 unit yang terdiri dari Rumah Makan sebanyak 166 unit, Warung Bakso sebanyak 43 unit dan Kedai Kopi sebanyak 11 unit.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub system yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Menurut Stephen P Robbins dalam M. Sukri (2010:8) organisasi merupakan satuan unit (satuan) sosial yang dikoordinasikan dengan sadar yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Dari beberapa macam pajak tersebut yang hendak menjadi perhatian adalah penerimaan pajak dari sektor Pajak Restoran. Sehingga Penulis merumuskannya dalam Tugas Akhir dengan mengangkat judul:

“Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

“Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu”.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan dari Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan Daerah khususnya penerimaan yang berasal dari Pajak Restoran.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Program Studi Administrasi

Perpajakan DIII dalam menerapkan disiplin ilmu yang ada berbagai langkah inovatif untuk masa yang akan datang.

3. Sebagai informasi dan pedoman bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan kajian ini dengan yang sama maupun tinjauan aspek lain pada masa yang akan datang.

4. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 1 Februari- 31 Maret 2012

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Staf-Staf pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, yaitu di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

b. Wawancara (Interview)

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan berbagai nara sumber yang penulis pandang dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Interview diberikan Kepada Staf-Staf pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

7. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, Uraian tugas, serta Struktur Organisasi unit kerja Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan distribusi tanggapan responden tentang tata cara pemungutan pajak restoran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kabupaten Rokan Hulu dan hasil pengelolaan data di lapangan hasil penelitian di lapangan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan sarana yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan

Hulu

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga sampai tahun 2011 ini.

Setelah terbentuknya kabupaten Rokan Hulu, maka terbentuklah beberapa dinas dan kantor yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 tentang organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Rokan Hulu

Visi

Terciptanya Peningkatan Penerimaan Daerah yang Memadai dengan Bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah.

Misi

1. Mengamankan rencana penerimaan yang terutang dalam APBD terutama pos Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
2. Menggali seluruh potensi daerah dalam rangka menciptakan sumber pendapatan yang baru dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah dari tahun ketahun.
4. Meningkatkan eksistensi Dinas Pendapatan dalam rangka Pengelolaan sumber- sumber Pendapatan Daerah.

3. Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Rokan Hulu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Tugas pokok bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut ialah sebagai berikut :

Pasal 408

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 409

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pajak bumi bangunan dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi dana perimbangan non PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 410

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :

- a. Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB;
- b. Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 411

- (1) Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bumi bangunan dan BPHTB.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
 - c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.
 - d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

- e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB guna penyempurnaan lebih lanjut
- f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier.
- g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB sebagai pedoman dan landasan kerja
- h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB
- j. menyiapkan bahan Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
- k. menyiapkan bahan Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
- l. menyiapkan bahan Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa

- m. menyiapkan bahan Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten
- n. menyiapkan bahan Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
- o. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
- q. laporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB

Pasal 412

- (1) Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perimbangan non pbb dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

- b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing
- d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah guna penyempurnaan lebih lanjut
- f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier
- g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai pedoman dan landasan kerja

- h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- i. menyiapkan bahan Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.
- j. menyiapkan bahan Pengelolaan DAU kabupaten.
- k. menyiapkan bahan Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.
- l. menyiapkan bahan Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.
- m. menyiapkan bahan Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).
- n. menyiapkan bahan Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
- o. menyiapkan bahan Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.
- p. menyiapkan bahan Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- q. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- r. melakukan koordinasi antar Seksi Dana Perimbangan Non PBB dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- s. Melaksanakan penata usahaan target dan penerimaan serta tunggakan Pajak Daerah, menerbitkan keterangan telah membayar Pajak Daerah, menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPPD)
- t. mencatat dan mengarsipkan seluruh Dokumen membuat/menyerahkan/ mengajukan daftar penetapan penerima dan tunggakan Wajib Pajak Daerah serta laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan

4. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah pegawai pada dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 65 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri dan Pegawai Honorer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1

Jumlah Pegawai Dinas pendapatan Rokan Hulu

No	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai	%
1	Pegawai Negri Sipil	48	73,85 %
2	Pegawai Honorer	17	26,15 %
Jumlah		65	100%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting , baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mendapat tujuan-tujuannya.

Untuk suatu kelancaran tugas dan kerja yang ada dalam organisasi yang jelas, guna mengetahui kepada siapa anggota perusahaan menerima tugas dan tanggung jawab serta prosedur yang harus dilalui orang bawahan apabila terjadi suatu masalah dengan perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Tujuan lain dari dibentuknya struktur organisasi adalah untuk menambahkan adanya jalur informasi dan pengawasan dari tiap – tiap bagian yang ada hubungannya serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai bawahan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriania dalam H.Bohari (2008:23) pajak adalah iuran pada Negara yang dapat di paksakan yang terutangnya oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk,dan yang di gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam H. Bohari (2008: 21) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat di paksakan) yang langsung data di tunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 28 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi yang dikemukakan para ahli dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2008 tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara
- b. Kewajiban yang dapat dipaksakan dan dapat dikenakan sanksi.
- c. Dipungut berdasarkan Undang-Undang.

- d. Tidak ada imbal jasa (Kontra Prestasi) yang langsung data ditunjuk, imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (*public service obligation*) dan sarana umum (*public utility*)
- e. Dipungut oleh/dan digunakan untuk keperluan Negara.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis- Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya adalah:

- a. Pajak pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. jenis-jenis pajak pusat adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea materai

- b. Pajak Daerah

- Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten/kota

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor. 34 Tahun 2000 di sebutkan jenis pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Bahan Galian Golongan C

6. Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Air Permukaan dan Pajak Bawah Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di jelaskan jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet dan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Pajak Restoran

Dikalangan para ahli perpajakan banyak yang memberikan pengertian pajak, tetapi secara garis besar pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai suatu tujuan. (Soemitro dalam Sukri, 2010: 16).

Dari berbagai defenisi pajak tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dan ciri- ciri pajak. Yang dimaksud dengan unsur adalah sesuatu yang mutlak yang harus ada, agar sesuatu itu ada, sedangkan yang dimaksud dengan ciri- ciri adalah tanda-tanda yang dapat diterima oleh panca indra (Sumyar dalam M.Sukri, 2010: 16)

Adapun unsur-unsur pajak adalah:

- a. Ada Undang-Undang pajak yang mendasari
- b. Ada penguasa pemungut pajak

- c. Ada subyek pajak
- d. Ada Objek pajak
- e. Ada masyarakat /kepentingan
- f. Ada surat ketetapan pajak (bersifat faktual)

Apabila satu unsur tersebut tidak ada maka tidak mungkin ada pajak. Oleh karena itu semua unsur harus ada supaya pajak ada.

Ciri –Ciri pajak adalah:

- a. Dapat berupa pajak langsung dan tidak langsung
- b. Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang
- c. Dapat dipaksakan
- d. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk
- e. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara
- f. Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat.
- g. Dapat dikenakan atas orang atau barang

Secara garis besar pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Didalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-Undang tentang pajak.

Pengertian Pajak Daerah yang dimaksud dalam perda No 1 tahun 2011 disini adalah iuran wajib pajak yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah

tampa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dengan demikian masyarakat dituntut untuk sadar membayar kepada badan yang telah ditunjuk pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yang wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Pajak Restoran.

Dengan demikian jelaslah bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak yang terkait atas jasa yang diberikan pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak rumah makan dan restoran yang diberlakukan terhadap usaha restoran.

4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 9 tentang pajak Restoran.

5. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk objek Pajak Restoran adalah:

1. Rumah Makan
2. Cafe/Warung Kopi
3. Bar
4. Warung Bakso Dan lain sejenisnya

Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan dan atau minuman yang di antar di bawa pulang.

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa tata boga atau katering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang di tetapkan oleh peraturan daerah (PERDA)

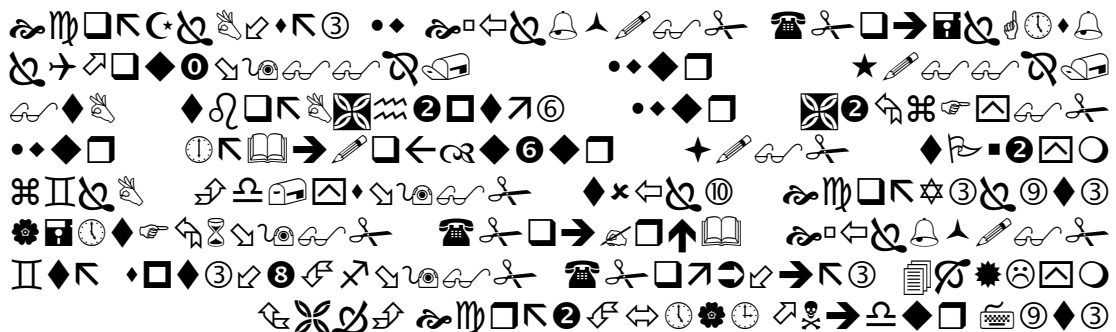
Yang dimaksud restoran yang terkena wajib pajak disini adalah seluruh restoran yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, di bawah pemilikan atau perusahaan orang pribadi atau badan yang sama.

7. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak yang terutang dalam agama Islam tertulis dalam al- Qur'an surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : Perangilah orang- orang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan ooleh Allah dan Rosulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang- orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah segan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At- Taubah: 29)

Jizyah di sini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang- orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dari mereka.

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya

dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad)

B. TINJAUAN PRAKTEK

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Tata Cara pemungutan pajak restoran yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Perda Nomor. 1 Tahun 2011 dalam BAB XV Tata Cara Pemungutan Pajak dikatakan:

1. Pemungutan pajak tidak dapat di borongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
2. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang di persamakan.

Sedangkan sistem dan tata cara pemungutan dan penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan secara fungsional dan pengadministrasiannya dilakukan secara berantai antara seksi satu berkaitan dengan seksi yang lainnya. Adapun sistem dan prosedur tata cara pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pendaftaran
2. Penetapan (menerbitkan SKPD)
3. Pembukuan dan Pelaporan (menghitung besar pajak)

4. Pemungutan (dipenda Rokan Hulu, Tahun 2010)

Dengan demikian rangkaian sistem pemungutan yang harus dioptimalkan pihak intern Dispenda sebagai kebijaksanaan yang diambil demi peningkatan penerimaan pajak restoran di Rokan Hulu dengan menjalankan semua prosedur pemungutan dan penerimaan tersebut diatas.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak restoran merupakan langkah awal yang harus dilakukan petugas secara optimal dan objektif dilapangan maupun dikantor, supaya seluruh potensi wajib pajak yang ada dapat tergali sehingga dapat menambah pemasukan jumlah pajak yang akan dipungut tentunya melalui penetapan target pajak restoran tersebut.

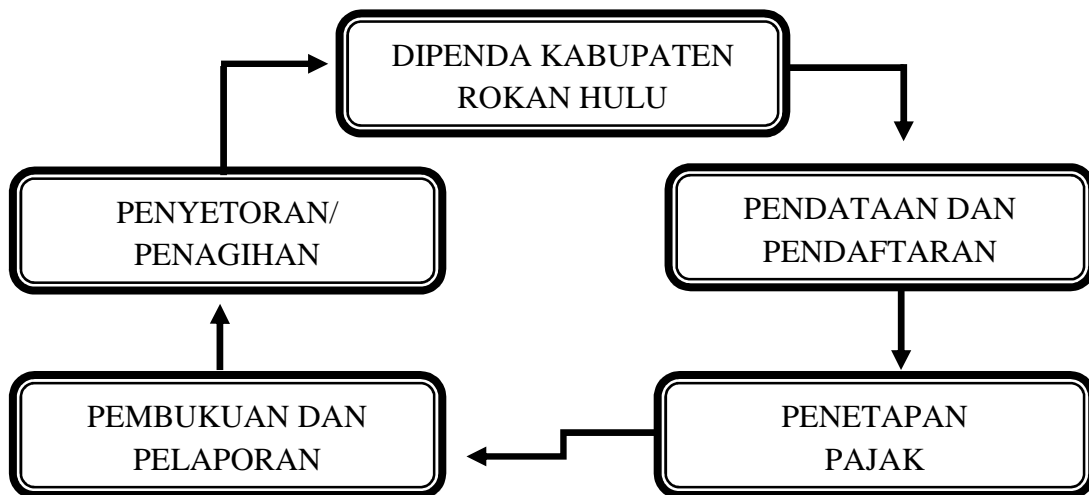
Dalam artinya lebih lanjut bahwa kegiatan dan pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran yang dilakukan oleh petugas secara optimal akan menetapkan target penerimaan yang ideal karena sudah dipertimbangkan berdasarkan dengan data-data yang ada dan tentunya unit kerja sebagai penetapan akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) terlebih dahulu.

Dengan demikian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pajak restoran ini khususnya melalui kegiatan penerimaan yang dilakukan, petugas yang telah ditunjuk haruslah bekerja seoptimal mungkin, disamping itu diminta agar wajib pajak meningkatkan kesadaranya untuk membayar pajak karena keberhasilan untuk pencapaian target tidak akan tercapai tanpa adanya hubungan kerjasama dalam hal ini petugas kolektor dengan masyarakat.

2. Prosedur Standar Pemungutan Pajak Restoran

Untuk mencapai tujuan dalam suatu kegiatan, organisasi diharuskan mempunyai suatu sistem dalam mencapai suatu tujuan tersebut, begitu juga halnya dengan kegiatan pemungutan dan penerimaan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, maka dibutuhkan sistem untuk pencapaian tujuan tersebut, disamping itu diperlukan juga prosedur-prosedur yang baik. Untuk melakukan kegiatan pemungutan dan penerimaan pajak restoran pihak Dispenda membuat sistem dan prosedurnya. Di bawah ini dapat dilihat bagan sistem dan prosedur pemungutan dan penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu:

GAMBAR III.1
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN
PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KABUPATEN ROKAN HULU



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dari bagan tersebut, sistem dan prosedur pemungutan dan penerimaan pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pendataan dan Pendaftaran

Kegiatan pendataan dan pendaftaran ini merupakan kegiatan yang mana petugas dinas pendapatan daerah melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Disamping itu wajib pajak harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati Rokan Hulu, didalam prakteknya wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga Puluh) sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh bidang Pendataan dan Penetapan pada seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Untuk mengetahui Pendaftaran dan Pendataan yang dilakukan dapat diketahui dari tanggapan responden dilapangan bahwa Wajib Pajak yang mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu hanya sebanyak 220 Wajib Pajak. Sedangkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.

Untuk lebih jelasnya objek pajak rumah makan dan restoran yang sudah terdata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.1

Jumlah Objek Pajak yang sudah terdata

No	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Rumah Makan	166
2	Warung Bakso	43
3	Kedai Kopi	11
Jumlah		220

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dilihat objek pajak restoran yang sudah terdata sudah cukup bagus karena dari pernyataan yang diberikan terdata sebanyak 220 unit yang terdiri dari Rumah Makan sebanyak 166 unit, Warung Bakso sebanyak 43 unit dan Kedai Kopi sebanyak 11 unit.

b. Penetapan Pajak

Penetapan pajak ini merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setiap pengusaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terhitung dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Setelah diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengusaha restoran di bebaskan tarif 10 % sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 13 tentang Pajak Restoran. Apabila pajak daerah tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

c. Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan pembukuan dan pelaporan ini merupakan kegiatan yang mana petugas atau pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukanya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata. Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2011 BAB XXI bahwa wajib pajak restoran dengan peredaran usaha sebanyak Rp. 300.000.000,00 per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

d. Pemungutan atau Penagihan

Kegiatan pemungutan atau penagihan ini merupakan kegiatan penarikan iuran atau pungutan pajak oleh petugas yang disertai wewenang berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan terhadap setiap wajib pajak yang terdata seperti ketetapan. Sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2011 BAB XV bahwa wajib pajak atau objek pajak membayar langsung ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu atau menyetor langsung ke Kas Daerah melalui Bank.

Tanggapan responden tentang pemungutan atau penagihan ini yaitu, bahwa prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan Perda tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mau menyetorkan sendiri pajaknya ke badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sehingga pihak Dispenda memungut langsung ke tempat wajib pajak melakukan usahanya.

3. Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan tarif pajak dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal (13) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Dengan berlakunya tarif pajak restoran yang telah disepakati sebesar 10% maka keberhasilan untuk pencapaian target yang dimaksud tidaklah terletak ditangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset semata melainkan rangkaian kerjasama seluruh unit kerja yang ada dengan melaksanakan sistem kerja yang sudah disusun secara optimal.

Untuk mengetahui tarif pajak restoran dapat dilihat tanggapan responden dilapangan:

Tanggapan responden tentang tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, tetapi tarif ini nyatanya dilapangan tidak berjalan dengan semestinya.

Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa tarif yang ditetapkan oleh Pemda dilapangan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak itu sendiri, sehingga dia menganggap bahwa pajak restoran itu terbeban pada dirinya sendiri, ini mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak dan melakukan negosiasi pengurangan tarif dengan alasan omzetnya yang sedikit.

Cara pajak yang harus dibayarkan menurut wawancara dengan pihak Dispenda Rokan Hulu adalah dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak. Sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang: Tarif} \times \text{DPP} = \text{Pajak Restoran}$$

4. Hambatan Hambatan dalam Pemungutan Pajak Restoran

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga tanpa disadari faktor-faktor

tersebut ikut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu.

1. Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Dispenda itu sendiri yaitu:
 - a. Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan.
 - c. Didalam pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam perda Nomor 1 Tahun 2011, belum terimplementasi seutuhnya, artinya hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum di terapkan seoptimal mungkin, sehingga wajib pajak tidak diberikan sanksi.
2. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Dispenda, antara lain:
 - a. Wajib pajak belum mengetahui arti penting pajak, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rokan Hulu.
 - b. Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.

- c. Wajib pajak menipuasi pembayaran pajaknya, dalam hal ini pembayaran yang dia lakukan tidak sesuai dengan pendapatan atau omzet penjualan yang diperoleh.
- d. Banyaknya penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- e. Minimnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajaknya sendiri ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

5. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

Menyadari betapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan daerah khususnya di kabupaten Rokan Hulu. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha restoran. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak.

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat dilingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengawasi Perda yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan denda kepada wajib pajak yang mana denda ini berlipat ganda apabila tidak juga dilunasi penunggakannya maka dapat di cabut izin usahanya.
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Dalam hal ini pendataan terhadap restoran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemungutan pajak Restoran ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 dalam BAB XV yaitu: 1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyetor sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, 2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur pemungutan dan penerimaannya adalah 1. Pihak Dipenda melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak, 2. Penetapan Pajak, 3. Pembukuan dan Pelaporan, 4. Penyetoran/ Penagihan.
2. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 BAB XV bahwa wajib pajak atau objek pajak membayar langsung ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu atau menyetor langsung ke Kas Daerah melalui Bank. Akan tetapi prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan Perda tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mau menyetorkan sendiri pajaknya ke badan

yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sehingga pihak Dispenda memungut langsung ke tempat wajib pajak melakukan usahanya.

3. Belum optimalnya penerapan pajak restoran di lapangan ini diakibatkan belum adanya pengawas yang bersikap tegas kepada wajib pajak. Sehingga masih adanya pengurangan tarif di lapangan.
4. Adanya hambatan internal seperti kurangnya pengawasan dan sanksi serta hambatan eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak restoran belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

1. Kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini hendaknya memaksimalkan pantauan dan pengawasan ke lapangan terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, baik kepada pegawai yang bekerja maupun objek pajak yang ada.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu hendaknya memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.
3. Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu hendaknya mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.

4. Wajib pajak yakni pengusaha restoran hendaknya selalu diberitahu untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan menyetor sendiri ke lembaga pemungut.
5. Untuk mencerdaskan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, hendaknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu mengadakan sosialisasi setiap satu kali dalam sebulan. Guna untuk mencerdaskan wajib pajak tentang perpajakan, khususnya pajak daerah .

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, UR Press ,Pekanbaru
- Azhari, 2010, *Perpajakan 1 (Pajak Penghasilan)*, Pekanbaru, UR Press Pekanbaru
- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak* , PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Mardiasmo, 2008 ,*Perpajakan edisi revisi 2008*, Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Pandiangnan Liberti, 2002, *Undang-Undang perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Siahaan, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukri.M, 2009, *Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Rumah Makan Kota Pekanbaru*,
- Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id> (diakses 20 September 2011).
- www. Rokan Hulu. Com (di akses 22 November 20011)
- Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 35 tahun 2002 tentang alokasi biaya pemungutan pajak daerah
- Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Reestoran

